

**PERAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKP2K) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RINZANI

NIM. 200802054

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2024 M/ 1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinzani
Nim : 200802054
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Mutiara, 02 Oktober 2000
Alamat : Desa Mutiara, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Yang Menyatakan,


METERAN
KOMPETENSI
F52ALX059576178

RINZANI

NIM. 200802054

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKP2K) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:

RINZANI

NIM. 200802054

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

AR - RANIRY

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Pembimbing II,

Dr. Taufik, M.Si.
NIP.198905182023211032

**PERAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKP2K) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

DI ACEH

SKRIPSI

RINZANI
NIM. 200802054

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

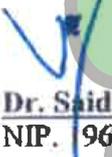
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 31 Juli 2024
25 Muharram 1446 H

Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 96110051982031007


Dr. Taufik, Sos, M.Si.
NIP. 198905182023211032

Penguji I,

Penguji II,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011


Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji beserta syukur atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Aceh”. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan untuk seluruh umat manusia. Skripsi ini di susun guna untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada seluruh pihak yang bersangkutan atas segala bantuan yang di berikan. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati peneliti ingin turut menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Muhammad Thalal Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Reza Idria, MA., PhD. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Muazzinah, M.PA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Siti Nur Zalikha, M.AP. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry.
8. Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Taufik, RM.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan.
11. Bapak dan Ibu pada Unit Pengelola Kegiatan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPK-TKP2K) yang telah

meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi dan data yang peneliti butuhkan selama penelitian.

12. Teristimewa kepada kedua orangtua yang tiada henti mendoakan yang terbaik dan memberikan dukungan untuk peneliti, kepada kakak dan adik tersayang serta keluarga yang turut mendoakan dan memberi dukungan yang tulus.

13. Teman-teman yang telah membersamai proses penyelesaian penelitian ini dan terkhusus kepada seseorang yang telah membantu dan memfasilitasi serta mendengarkan keluh kesah peneliti dari awal sampai akhir masa perkuliahan.

14. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena terus berusaha dan mampu berjuang untuk menyelesaikan tanggungjawab atas semua yang telah dimulai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi lebih baik kedepannya. Peneliti berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk semuanya. *Amin ya Rabbal'amin.*

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Peneliti,

Rinzani

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibentuk oleh Pemerintah Aceh sebagai tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan di Aceh. Akan tetapi, keberadaan tim tersebut ternyata belum mampu mencapai tujuan dari pembentukannya yaitu untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan melalui publikasi Badan Pusat Statistik bahwa dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan di Provinsi Aceh tidak pernah mengalami penurunan yang signifikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Peran Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Aceh beserta hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh masih belum mampu mencapai tujuan dalam menanggulangi kemiskinan di Aceh, hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan wewenang dalam proses kolaborasi karena masih didominasi oleh pihak pemerintah serta belum adanya kebijakan inovatif dari Gubernur Aceh. Berdasarkan seluruh proses kolaborasi, dihasilkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan partisipasi multi pihak dalam suatu program penanggulangan kemiskinan. Hambatan yang ditemukan yaitu tidak adanya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta rendahnya sinergitas antar pemerintah Aceh dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Aceh. Oleh sebab itu, Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh harus mampu bertanggungjawab pada tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 serta memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk menyesuaikan dengan data pada sistem pemerintah dan meningkatkan sinergitas antar Pemerintah Aceh agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif.

Kata Kunci : Penanggulangan Kemiskinan, TKP2K

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Teori Peran.....	10
2.3. Teori Kebijakan.....	11
2.3.1. Tahap-Tahap Kebijakan.....	11
2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan..	13
2.4. Konsep Penanggulangan.....	14
2.5. Kerangka Berfikir.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1. Pendekatan Penelitian.....	16
3.2. Fokus Penelitian.....	16
3.3. Lokasi Penelitian.....	18
3.4. Sumber Data.....	18
3.5. Informan Penelitian	19

3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.6.1. wawancara.....	20
3.6.2. Dokumentasi.....	20
3.6.3. Observasi.....	21
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
4.1.1. Deskripsi TKP2K.....	23
4.1.2. Tugas dan Fungsi TKP2K Aceh.....	24
4.1.3. Keanggotaan Dalam TKP2K Aceh.....	25
4.2. Hasil Penelitian.....	28
4.2.1. Peran TKP2K Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh	
4.2.2. Hambatan yang Dihadapi TKP2K Dalam Penanggulangan	
Kemiskinan di Aceh.....	50
4.3. Pembahasan.....	55
4.3.1. Peran TKP2K.....	55
BAB V PENUTUP.....	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

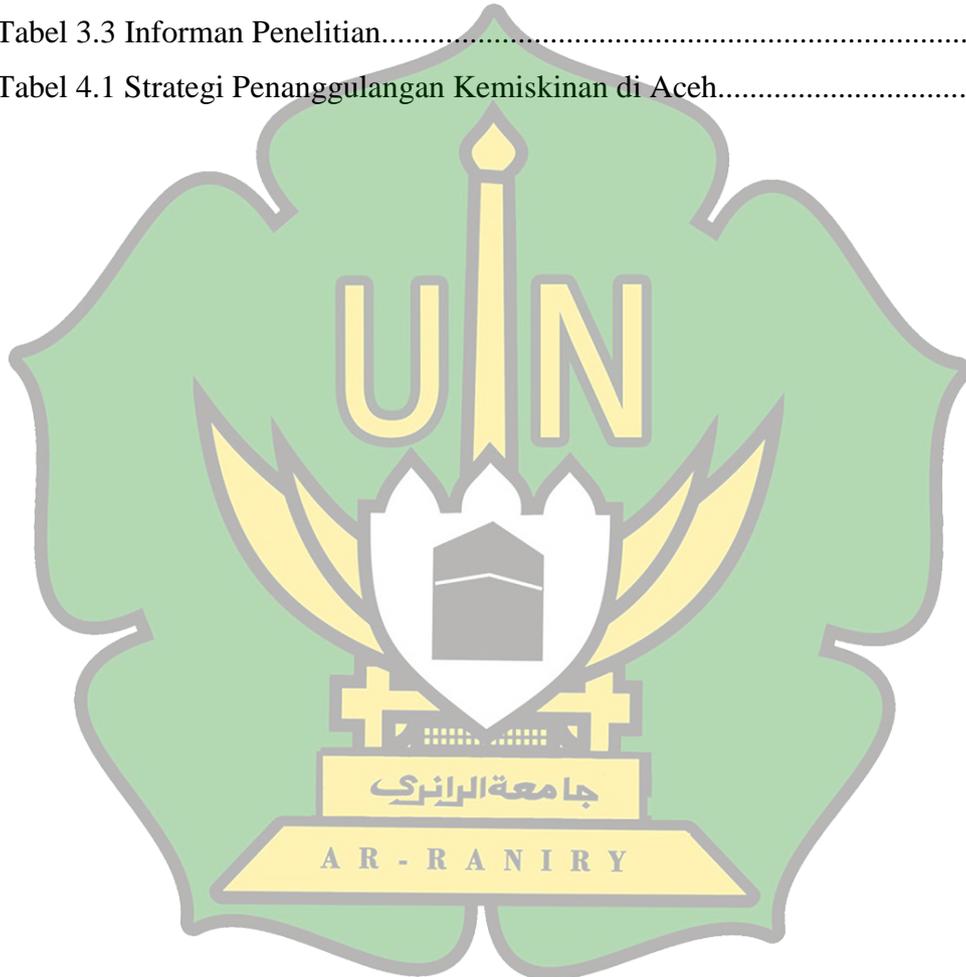
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi TKP2K.....	27
Gambar 4.2 Sumberdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh.....	30
Gambar 4.3 Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan.....	41
Gambar 4.4 Penanggulangan Kemiskinan Aceh Berdasarkan BDT/DTKS (Bidang Ekonomi).....	45
Gambar 4.5 Penanggulangan Kemiskinan Aceh Berdasarkan BDT/DTKS (Bidang Kesehatan dan Pendidikan).....	46
Gambar 4.6 Penanggulangan Kemiskinan Aceh Berdasarkan BDT/DTKS (Bidang Pangan dan Infrastruktur Dasar).....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringakasan Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Peran TKP2K.....	17
Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Hambatan TKP2K.....	17
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Aceh.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan adalah permasalahan yang tidak pernah ada habisnya, dimana kebutuhan dasar manusia tidak dapat terpenuhi seperti sandang, papan, dan pangan dikarenakan kurang atau rendahnya pendapatan. Kemiskinan menjadi persoalan rumit yang sedang dihadapi oleh seluruh Negara di dunia. Hal ini juga di singgung dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) atau lebih di kenal juga dengan Tujuan Pembangunan Milenium yang merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Millenium dengan 189 anggota Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 2000.

Ada delapan sasaran MDGs yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengupayakan kesetaraan *gender* dan pemberdayaan bagi perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memberantas HIV/AIDS serta penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Dari seluruh sasaran tersebut memberantas kemiskinan dan kelaparan merupakan tujuan utama dari MDGs.

Setelah tahun 2015, MDGs dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup 17 target utama yang ingin dicapai dunia mulai dari tahun 2015-2030. Ketujuh belas target tersebut meliputi (1) Tidak adanya kemiskinan, (2) Tidak terjadi kelaparan, (3) Kesehatan yang berkualitas dan kesejahteraan bagi masyarakat, (4) Pendidikan yang tinggi, (5) Penyetaraan gender,

(6) Air bersih serta sanitasi yang ramah lingkungan, (7) Energi bersih dan dapat dijangkau setiap kalangan, (8) Pertumbuhan ekonomi serta pekerjaan yang layak, (9) Industri, inovasi serta infrastruktur, (10) Meminimalisir kesenjangan, (11) Kota dan komunitas berkelanjutan, (12) Konsumsi maupun produksi yang bertanggung jawab, (13) Penanganan perubahan iklim, (14) Ekosistem laut, (15) Ekosistem darat, (16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh, (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.¹

Masalah kemiskinan selalu menjadi prioritas utama, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Perhatian terhadap masalah kemiskinan ini terus ditekankan karena pemerintah menyadari bahwa gagal mengatasi kemiskinan dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks di masyarakat.² Pemerintah menghadapi tantangan dalam upaya mengurangi kemiskinan karena kurangnya pemahaman dari berbagai pihak mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.³ Karenanya, masalah kemiskinan menjadi prioritas yang harus diselesaikan dalam upaya pembangunan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.^{N I R Y}

Pemerintah Republik Indonesia telah secara konsisten melakukan berbagai langkah percepatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang akselerasi

¹ Vania Grace Sianturi, M. Syafii, Ahmad Albar Tanjung, 'Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019)',

² Erwan Agus Purwanto, 'Mengkaji Potensi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10.3 (2007), 295–324.

³ Mustofa Mustofa, 'Kemiskinan Multidimensi Di Kota Yogyakarta', *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 15.1 (2018), 27–34.

Program Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan tersebut mencakup pengembangan program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dukungan untuk usaha ekonomi mikro, serta program-program seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.

Berawal dari terlaksananya otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan diberikannya hak pada setiap pemerintah daerah untuk mengelola sektor ekonomi daerah secara mandiri. Kondisi kemiskinan yang aktual di Indonesia setidaknya dapat di atasi dengan beberapa pendekatan. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah. Kedua, meningkatkan aksesibilitas kelompok miskin. Ketiga menyediakan fasilitas kredit untuk masyarakat, pembentukan kelompok mandiri, bantuan modal bergilir dan sebagainya. Keempat, meningkatkan infrastruktur yang ada di desa. Kelima, mengembangkan kelembagaan, seperti mengembangkan wilayah, mengembangkan kawasan terpadu, dan program peningkatan pendapatan petani kecil.⁴

Secara nasional, dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010..⁵ Tim Nasional

⁴ Hisnuddin Lubis, 'Mengentaskan Kemiskinan:Multidimensional Approaches'.

⁵ Ibid Pasal 7

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁶ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah sebuah tim koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang bertugas untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.⁷

“Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertugas:

1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan”⁸

Adapun keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.⁹

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, khususnya di Provinsi Aceh yang disebut sebagai Provinsi termiskin di Sumatera. Hal ini didasarkan pada persentase angka kemiskinan di Provinsi Aceh yang tampak lebih tinggi dari pada berbagai daerah lain di Pulau Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

⁶ Ibid Pasal 8

⁷ Ibid Pasal 1 Angka 3

⁸ Ibid Pasal 9

⁹ Ibid Pasal 10 ayat (1)

Tabel 1.1
Persentase Angka Kemiskinan di Pulau Sumatera

Provinsi	Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2021-2023				
	2021		2022		2023
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)
Aceh	15,33	15,53	14,64	14,75	14,45
Sumatera Utara	9,01	8,49	8,42	8,33	8,15
Sumatera Barat	6,63	6,04	5,92	6,04	5,95
Riau	7,12	7,00	6,78	6,84	6,68
Jambi	8,09	7,67	7,62	7,70	7,68
Sumatera Selatan	12,84	12,79	11,90	11,95	11,78
Bengkulu	15,22	14,43	14,62	14,34	14,04
Lampung	12,62	11,67	11,57	11,44	11,11
Kep. Bangka Belitung	4,9	4,67	4,45	4,61	4,52
Kep. Riau	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69

Sumber : BPS, diolah 2021

“Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh telah menyusun dokumen Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh. Dokumen ini mencakup analisis kondisi dan karakteristik kemiskinan di Aceh, serta berbagai tantangan yang dihadapi. Dokumen tersebut juga memuat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan semua pihak terkait untuk mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan.”¹⁰

¹⁰ TKP2K Aceh, Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh 2018-2022, (Banda Aceh: 2018)

Dengan demikian, hasil dari persentase angka kemiskinan di Pulau Sumatera menyatakan bahwa Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di bandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh belum mampu mencapai tujuan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait permasalahan kemiskinan yang ada di Provinsi Aceh dengan mengangkat judul 'Peran Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh'.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terbatasnya peran TKP2K dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh
2. Hambatan peran TKP2K dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh

1.2.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran TKP2K dalam penanggulangan kemiskina di Aceh?
2. Apa saja hambatanR yang di hadapi YTKP2K dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis peran TKP2K dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh

2. Untuk menganalisis hambatan yang di hadapi TKP2K dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah dimiliki oleh peneliti agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
2. Dapat melaksanakan aktivitas secara administrasi di lapangan.

